



**PEMERINTAH
KABUPATEN
TEMANGGUNG**

2024

ASPM

**ANALISIS SITUASI
PEMBANGUNAN
MANUSIA**

- INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
- USIA HARAPAN HIDUP
- HARAPAN LAMA SEKOLAH
- RATA-RATA LAMA SEKOLAH
- PENGELUARAN PERKAPITA
- KEMISKINAN
- PERTUMBUHAN EKONOMI
- INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

DISUSUN OLEH :

**Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Temanggung**



Pemkab Temanggung



temanggungkab.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan buku ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengharuskan perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Buku ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Temanggung, serta dapat dijadikan panduan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik di masa mendatang. Informasi yang disajikan dalam buku ini mengacu pada pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari empat indikator utama yaitu Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku **Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Kabupaten Temanggung Tahun 2024** ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan daerah. Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Temanggung, 10 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WILJANTO WURIATMODJO, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197712121997021006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Sumber Data.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II METODOLOGI.....	6
2.1 Konsep Pembangunan Manusia.....	6
2.2 Metodologi Penghitungan IPM.....	8
BAB III ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TEMANGGUNG.....	15
3.1. Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung.....	15
3.2. Status Pembangunan Manusia dan Kecepatan IPM.....	19
3.3. Angka Harapan Hidup.....	22
3.4. Harapan Lama Sekolah.....	24
3.5. Rata – Rata Lama Sekolah.....	26
3.6. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan.....	28
3.7. Tipologi Daerah Menurut IPM dan Pertumbuhan Ekonomi.....	30
3.8. Tipologi Daerah Menurut IPM dan Kemiskinan.....	36
BAB IV GENDER PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TEMANGGUNG.....	41
4.1. Umur Perempuan Lebih Panjang Dibanding Laki-Laki.....	43
4.2. Capaian Pendidikan Antar Gender Sudah Cukup Baik.....	45
4.3. Kesetaraan Ekonomi Antar Gender.....	47
BAB IV KESIMPULAN.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Korelasi <i>Rank Spearman</i> IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2023	34
Tabel 3.2	Korelasi <i>Rank Spearman</i> IPM dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2023	40

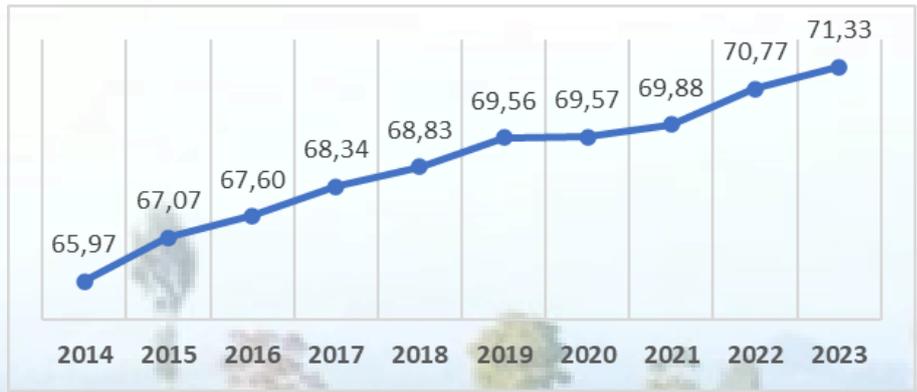


DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah, 2019 – 2023	16
Gambar 3.2	IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2023	17
Gambar 3.3	Peta Tematik IPM Menurut Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu, 2019 – 2023	18
Gambar 3.4	Peta Tematik Kabupaten/Kota Menurut Klasifikasi Capaian IPM	20
Gambar 3.5	Tren dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2012 – 2023	21
Gambar 3.6	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	22
Gambar 3.7	Peta Tematik Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu, 2023	23
Gambar 3.8	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2023.....	25
Gambar 3.9	Peta Tematik Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu, 2023	26
Gambar 3.10	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2023	27
Gambar 3.11	Peta Tematik Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu, 2023	28
Gambar 3.12	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2023 (000).....	29
Gambar 3.13	Peta Tematik Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu, 2023	30
Gambar 3.14	Perkembangan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi (Tahun Dasar 2010) Menurut Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah 2019 – 2023	31

Gambar 3.15	Tipologi Daerah Menurut IPM dan Pertumbuhan Ekonomi (ADHK 2010) di Provinsi Jawa Tengah, 2023	33
Gambar 3.16	Perkembangan IPM dan Kemiskinan Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah, 2019 – 2023	37
Gambar 3.17	Tipologi Daerah Menurut IPM dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah, 2023	38
Gambar 4.1	Perkembangan IPM Laki-Laki, IPM Perempuan, IPM dan IPG Kabupaten Temanggung, 2019 – 2023	43
Gambar 4.2	Perkembangan Usia Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung, 2019 – 2023	44
Gambar 4.3	Perkembangan Rata-Rata Lama sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung, 2019 – 2023	46
Gambar 4.4	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung, 2019 – 2023	47
Gambar 4.5	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung, 2019 – 2023	48

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung 2023

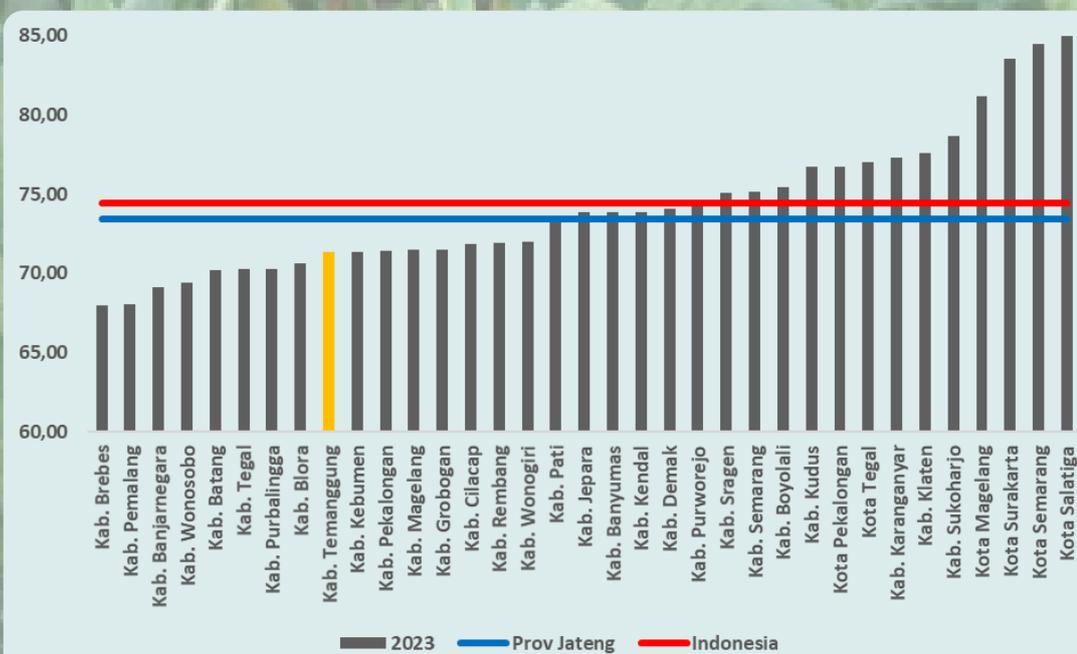


- IPM Kab. Temanggung terus mengalami peningkatan.
- Selama tahun 2014-2023, secara rata-rata IPM meningkat sebesar 0,85%. IPM tahun 2023 mencapai 71,33 meningkat 0,56 poin (0,79%) dibandingkan tahun 2022 (70,77).
- Angka IPM terbentuk dari 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS), sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran perkapita.
- Kab. Temanggung mengalami peningkatan pada seluruh dimensi tersebut.



- Meskipun terjadi peningkatan pada semua dimensi, namun jika dibandingkan dengan posisi kab/kota lain di Jawa Tengah, rata-rata Jawa Tengah (73,39) atau bahkan rata-rata Nasional (74,39), IPM Kab. Temanggung masih tertinggal.
- Temanggung berada di peringkat ke-27 dari 35 kab/kota se-Jawa Tengah.
- Selisih antara IPM Kab. Temanggung dengan rata-rata IPM Jawa Tengah sebesar 2,06 sedangkan selisih dengan IPM Nasional sebesar 3,06.
- Dimensi yang paling rendah peringkatnya yaitu Pengeluaran Riil Per Kapita.

Posisi IPM Kab. Temanggung di tingkat Provinsi dan Nasional



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Sumber daya manusia yang berkualitas diperoleh dari peningkatan akses pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, kompetensi siswa di bidang literasi dan sains, meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pengembangan jaminan kesehatan (BPS, 2020).

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan upaya yang optimal, peningkatan sinergi pemerintah pusat dan daerah serta penguatan kolaborasi pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. (Perpres 85/2021).

Sementara itu, pandemi COVID-19 merupakan sebuah guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya (*unprecedented shock*) yang mengubah secara signifikan pola interaksi antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan *social distancing* dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung

aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era *new normal*, meskipun kekebalan komunitas (*herd immunity*) diharapkan telah tercapai di tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk pemulihan dampak COVID-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik. Sehingga dirumuskan dua Sasaran Pembangunan tahun 2023 yaitu percepatan pemulihan ekonomi, dan peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia. Lebih rinci lagi, Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan merupakan salah satu dari lima Prioritas Nasional (PN).

Sejalan dengan hal tersebut, Kabupaten Temanggung turut merumuskan Pembangunan Manusia sebagai salah satu dari tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung, dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja utama daerah.

Model pembangunan manusia yang diperkenalkan *United Nation Development Program* (UNDP) didefinisikan sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau proses perluasan pilihan bagi penduduk. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*). Selanjutnya pada tahun 1990, UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai sebuah angka yang mampu menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Menurut UNDP, Indeks Pemangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Nilai dari tiap dimensi IPM diagregasi menjadi indeks komposit menggunakan rata-rata geometrik. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

1. umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
2. pengetahuan (*knowledge*); dan
3. standar hidup layak (*decent standard of living*) (UNDP, 2022).

Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut:

1. Indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. Penentuan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (BPS, 2022).

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan publikasi “Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2024” secara umum adalah untuk melihat perkembangan IPM Kabupaten Temanggung hingga tahun 2023. Sedangkan tujuan secara khusus adalah :

1. Melihat perkembangan IPM Kabupaten Temanggung dan masing-masing komponen IPM selama tahun 2019 – 2023.

2. Mengetahui posisi relatif capaian IPM Kabupaten Temanggung terhadap capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan terhadap Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Kedu.
3. Mengetahui bagaimana hubungan antara IPM, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Kabupaten Temanggung 2023 terhadap kondisi di Provinsi Jawa Tengah.
4. Mengetahui perkembangan pembangunan berbasis gender dalam pembangunan manusia Kabupaten Temanggung.

1.3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari kompilasi data sekunder resmi dari Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Temanggung.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Menyajikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang, tujuan, sumber data, dan sistematika penulisan
- Bab II Menyajikan tentang metodologi meliputi konsep tentang pembangunan manusia dan perkembangan metode penghitungan IPM.
- Bab III Menyajikan analisis dan pembahasan yang meliputi perkembangan pembangunan di Kabupaten Temanggung dalam beberapa dimensi, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Temanggung serta hubungan antara IPM dan pertumbuhan ekonomi maupun kemiskinan.

Bab IV Menyajikan data dan analisis Indeks Pembangunan Gender dan komponen Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Temanggung

Bab V Menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis.



BAB II METODOLOGI

2.1. Konsep Pembangunan Manusia

Ide dasar pembangunan manusia menggunakan konsep yang disusun oleh *United Nation Developmet Program* (UNDP) yang berfokus pada manusia serta kesempatan dan pilihan yang mereka miliki.

- **Manusia**

Pembangunan manusia harus berfokus pada peningkatan kualitas kehidupan yang dijalani oleh masyarakat dibandingkan dengan hanya mengandalkan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan secara otomatis meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam sudut pandang ini, pertumbuhan ekonomi dilihat sebagai sarana pembangunan, bukan tujuan akhir pembangunan.

- **Kesempatan**

Pembangunan manusia pada prinsipnya memberikan lebih banyak kebebasan kepada manusia untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Hal ini berarti bahwa pembangunan manusia harus mampu mengembangkan kemampuan manusia dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggunakan kemampuannya. Misalnya, mendidik seorang perempuan akan membangun keterampilannya. Akan tetapi, hal tersebut tidak bermakna jika dia tidak diberi akses ke pekerjaan atau jika ketrampilan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan di pasar luas.

- **Pilihan**

Pembangunan manusia pada dasarnya membahas tentang lebih banyak pilihan. Pembangunan manusia memberikan peluang kepada masyarakat, bukan memaksa mereka untuk memanfaatkannya. Tidak ada yang dapat

menjamin kebahagiaan manusia dan pilihan yang dibuat setiap orang adalah tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, pembangunan manusia harus mampu menciptakan lingkungan bagi masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki secara optimal. Pembangunan manusia juga harus memastikan bahwa masyarakat dapat memiliki kesempatan yang sama untuk menjalani kehidupan yang produktif dan kreatif.

Sebagai salah satu upaya untuk menganalisis status pembangunan baik antar negara maupun antar daerah, maka UNDP menyusun *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diterbitkan dalam publikasi berjudul *Human Development Reports* (HDR).

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia setiap tahunnya dapat diamati dari perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun. Keterbandingan antara angka IPM kabupaten dengan kabupaten/kota lain, angka IPM provinsi bahkan angka IPM nasional menentukan posisi relatif capaian IPM sekaligus mengukur relevansi pembangunan manusia di kabupaten tersebut dengan tingkat pemerintahan di atasnya.

2.2. Metodologi Penghitungan IPM

2.2.1. Komponen Penghitungan IPM

- a. Usia Harapan Hidup saat lahir, bersumber dari Sensus Penduduk 2020 (SP2020, Proyeksi Penduduk).
- b. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah bersumber dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)
- c. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

2.2.2. Konsep dan Definisi

Usia Harapan Hidup Saat Lahir - UHH (*Life Expectancy – e⁰*)

Usia Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

Rata-Rata Lama Sekolah - RLS (*Mean Years of Schooling - MYS*)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (*Expected Years of Schooling -EYS*)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan jumlah penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari SUSENAS, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2013=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

2.2.3. Teknis Penghitungan

Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling (EYS)*

$$\text{Formula HLS} = \text{EYS}_{\alpha}^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan :

$\text{HLS} = \text{EYS}_{\alpha}^t$ Harapan Lama Sekolah pada umur α di tahun t

E_i^t jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i Usia ($a, a+1, \dots, n$)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years Schooling (MYS)*

Ijazah	Konversi tahun lama sekolah (tahun)
Tidak punya ijazah	0
Sekolah Dasar	6
SMP	9
SMA	12
D1/D2	14
D3	15
S1/D4	16
S2/S3	18

Cara menghitung rata – rata lama sekolah

- menyeleksi penduduk pada usia 25 tahun ke atas.
- mengelompokkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki.
- mengelompokkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki.
mengkonversi tahun lama sekolah menurut ijazah terakhir.
- menghitung lamanya bersekolah sampai kelas terakhir.

Keterangan	Lama Sekolah
Tidak Pernah Sekolah	0
Masih sekolah di SD s.d. S1	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Masih sekolah S2 atau S3	Konversi ijazah terakhir + 1 Ket: Karena pada SUSENAS kode kelas untuk yang sedang kuliah S2 = 6 dan kuliah S3 = 7 yang tidak menunjukkan kelas
Tidak bersekolah lagi tetapi tidak tamat di kelas terakhir	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Tidak sekolah lagi dan tamat pada jenjang	Konversi ijazah terakhir

Pengeluaran per kapita per bulan

Data pengeluaran per kapita perbulan didapat dari data publikasi resmi BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Temanggung, dimana hasil publikasi tersebut bersumber dari kegiatan BPS yaitu:

- Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dari SUSENAS. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari SUSENAS Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota.
- Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dalam harga konstan (riil). Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2013=100

$$\overline{X'_t} = \frac{\overline{X_t}}{IHK_{(t,2013)}} \times 100$$

dimana :

$\overline{X'_t}$ = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2013

$\overline{X_t}$ = Rata – rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

$IHK_{(t,2013)}$ = IHK tahun t dengan tahun dasar 2013

Menghitung *Purchasing Power Parity* (PPP)

- menghitung *value* (rupiah yang dikeluarkan) dan *quantity* (jumlah barang yang dikonsumsi) 96 komoditas PPP dari data Susenas Modul Konsumsi, terdiri dari 66 komoditas makanan dan 30 komoditas non makanan.
- menghitung *quantity* komoditi perumahan dari data Susenas KOR.
- menghitung harga rata-rata setiap komoditas. Harga yang tidak dapat diperoleh dari Susenas Modul Konsumsi diproksi dengan harga dari IHK.
- menghitung relatif harga terhadap Jakarta Selatan.
- menghitung PPP:

$$PPP = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

dimana

p_{ij} = harga komoditas i di Jakarta Selatan

p_{ik} = harga komoditas i di kabupaten/kota j

m = jumlah komoditas

c. Menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut :

Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran yaitu ;

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Dalam menghitung IPM, diperlukan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator. Berikut tabel yang menyajikan nilai-nilai tersebut.

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Usia Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per kapita disesuaikan		100 (PPP U\$)	1.007.436* (Rp)	1.007.721 (PPP U\$)	26.572.352** (Rp)

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua.

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.



BAB III ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TEMANGGUNG

3.1. Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2019-2023 adalah “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM**”. Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
- b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Kualitas pembangunan manusia, terutama kualitas sumber daya manusia diindikasikan dengan IPM. Indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia setiap tahunnya dapat diamati dari perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun. Keterbandingan angka IPM kabupaten dengan kabupaten/kota lain, angka IPM provinsi bahkan angka IPM nasional menentukan posisi relatif capaian IPM sekaligus mengukur relevansi pembangunan manusia di kabupaten itu dengan tingkat pemerintahan di atasnya.

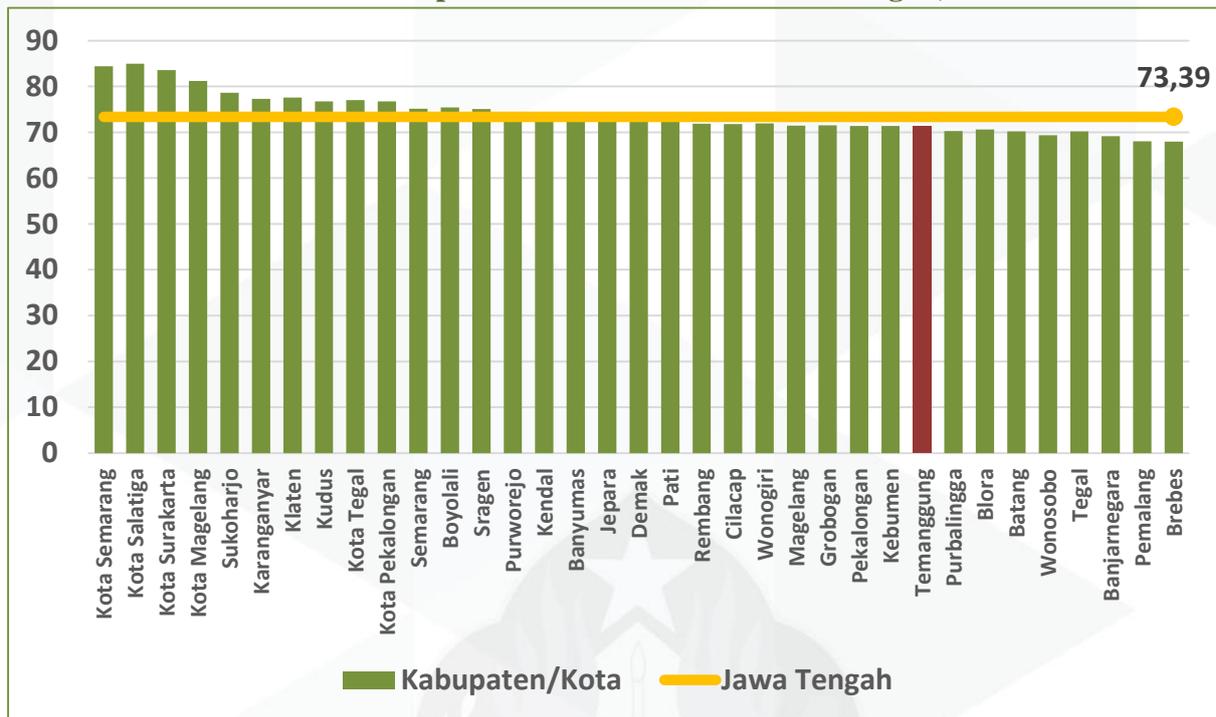
Gambar 3.1.
Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung dan
Provinsi Jawa Tengah, 2019 – 2023



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Sepanjang lima tahun terakhir, Kabupaten Temanggung mengalami kemajuan pembangunan sebagaimana terlihat dari nilai IPM yang terus naik. Pada Tahun 2019, IPM Kabupaten Temanggung adalah sebesar 69,56 kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai 71,39 pada Tahun 2023. Meskipun angka-angka ini masih berada di bawah IPM Provinsi Jawa Tengah yang bermakna bahwa secara umum capaian pembangunan SDM Kabupaten Temanggung masih dibawah capaian pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

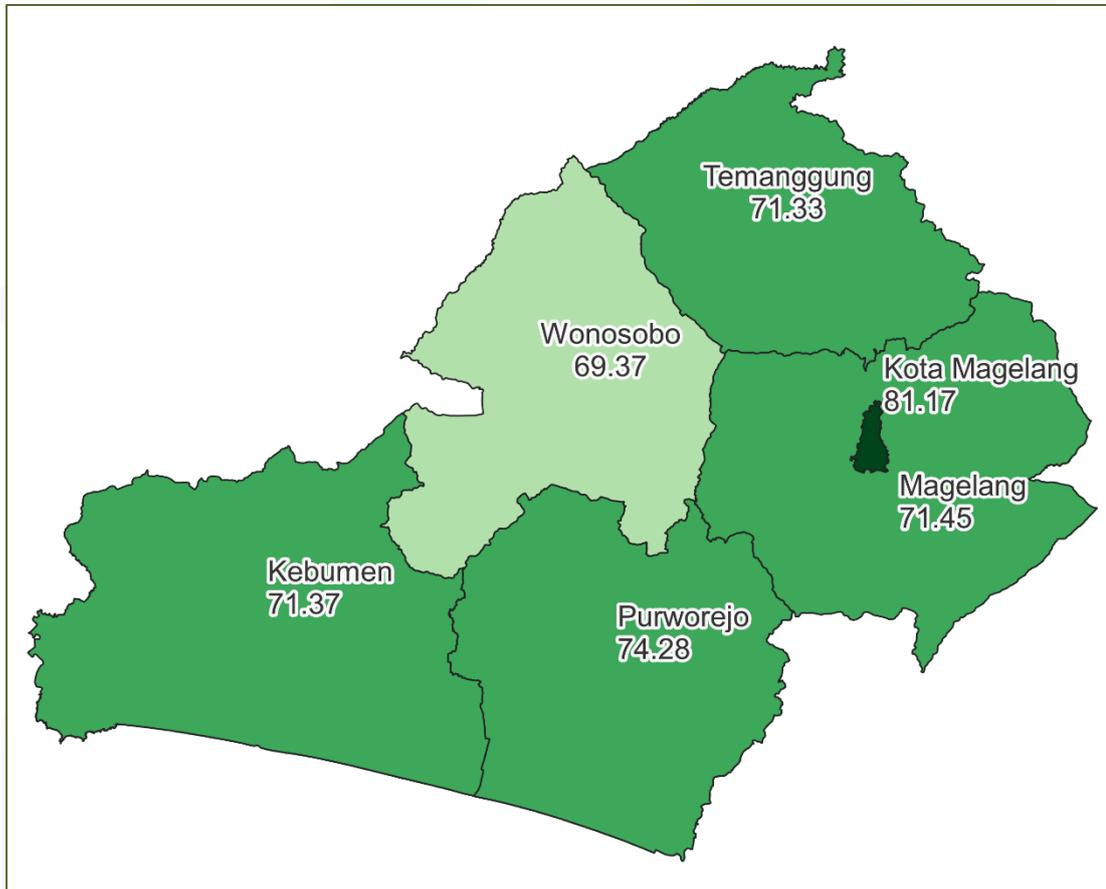
Gambar 3.2
IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Jika dibandingkan antar kabupaten/kota se Jawa Tengah, maka pada tahun 2023, IPM Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke-27 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, yang berarti bahwa keadaan pembangunan Kabupaten Temanggung dari segi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, masih banyak tertinggal dari sebagian besar kabupaten/kota lainnya. Hal ini pula yang membuat IPM Kabupaten Temanggung berada di bawah IPM Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 3.3
Peta Tematik IPM Menurut Kabupaten/Kota
se Eks Karesidenan Kedu, 2023



Jika dibandingkan dengan regional eks Karesidenan Kedu, IPM Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 juga terlihat tertinggal, yaitu hanya pada peringkat ke-5 dari 6 kabupaten/kota, lebih tinggi dibanding Kabupaten Wonosobo. Artinya dalam regional eks Karesidenan Kedu pun, pembangunan di Kabupaten Temanggung tertinggal dibanding dengan Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang.

3.2. Status Pembangunan Manusia dan Kecepatan IPM

Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

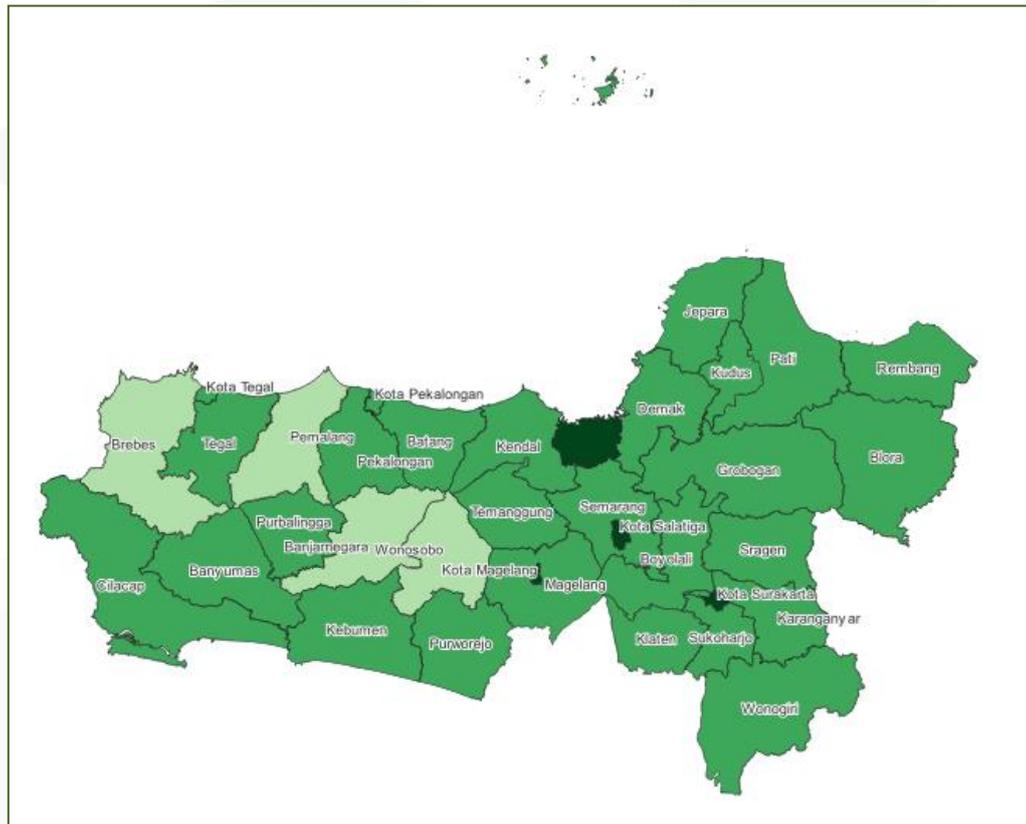
- Sangat Tinggi : $IPM \geq 80$
- Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- Rendah : $IPM < 60$

Pada tahun 2023, terdapat 4 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang sudah mencapai status **pembangunan sangat tinggi**, yaitu Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Magelang. Sedangkan kabupaten/kota yang mencapai status **pembangunan tinggi** meliputi 23 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Delapan kabupaten/kota sisanya mencapai status **pembangunan sedang**.

Selain angka capaian pembangunan manusia yang terus tumbuh, perkembangan pembangunan manusia juga bisa dilihat dari perkembangan status pembangunan manusianya. Selama hampir satu dekade sejak 2013, Kabupaten

Temanggung akhirnya berhasil menaikkan posisi dari kategori pembangunan sedang menuju pembangunan tinggi mulai tahun 2022.

Gambar 3.4.
Peta Tematik Kabupaten/Kota Menurut
Klasifikasi Capaian IPM, 2023



Keterangan :
■ : Sangat tinggi
■ : Tinggi
■ : sedang

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya.

Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

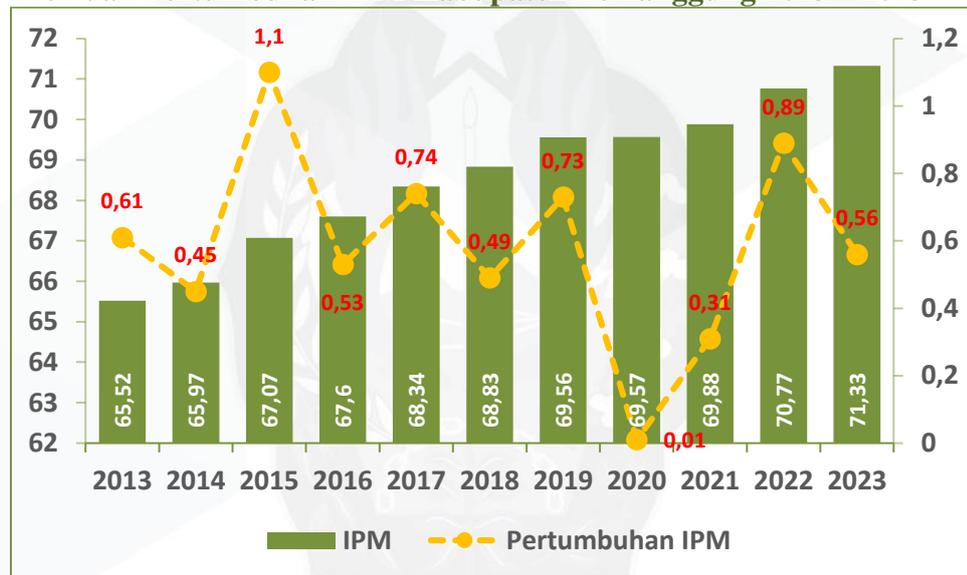
$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun $(t-1)$

Gambar 3.5.
Tren dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung 2013 – 2023



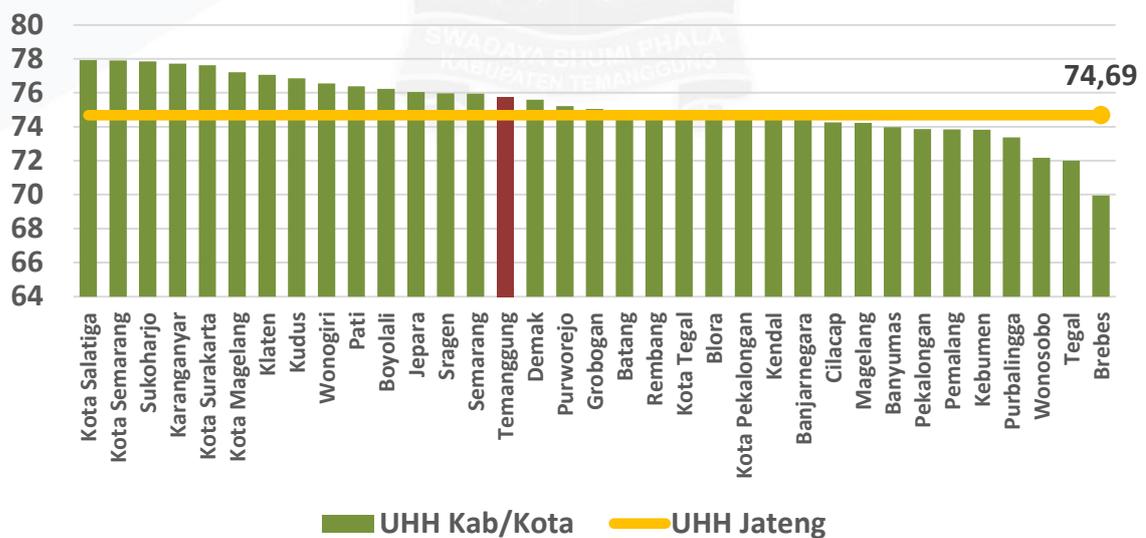
Kabupaten Temanggung mencatat kemajuan pembangunan manusia sebagaimana terlihat dari nilai IPM yang terus meningkat sepanjang 2013 – 2023. Termasuk pada tahun 2020 ketika pandemic Covid-19 menyerang secara global, nilai IPM Kabupaten Temanggung tetap naik meskipun hanya sebesar 0,01. Nilai IPM terus meningkat setelahnya, sehingga untuk pertama kalinya, di tahun 2022 Kabupaten Temanggung telah masuk dalam kategori Pembangunan Tinggi dan masih mempertahankan kategori tinggi sampai tahun 2023.

Jika dilihat dari segi pertumbuhannya, nampak bahwa pertumbuhan IPM cukup bervariasi. Pertumbuhan paling mencolok pasca pandemi Covid-19 yang mulai melanda sejak awal Maret 2020, yaitu pada tahun 2022 sebesar 0,89. Namun pada tahun 2023 walaupun nilai IPM meningkat, namun pertumbuhannya hanya 0,56 tidak lebih tinggi dari tahun 2022.

3.3. Usia Harapan Hidup

Derajat kesehatan mempunyai hubungan timbal balik dengan pembangunan manusia. Usia Harapan Hidup yang tinggi setidaknya menunjukkan gambaran lebih terjaminnya aspek kesehatan, lingkungan yang sehat, sosial kemasyarakatan yang aman terjamin dan faktor-faktor pendukung alami lainnya. Selain itu Usia Harapan Hidup yang tinggi juga dipengaruhi oleh peran genetika, gizi, makanan, pola hidup, rendahnya paparan pencemaran serta kematangan psikologis sehingga seseorang secara alami menjadi lebih kuat/siap menghadapi tekanan hidup/stress.

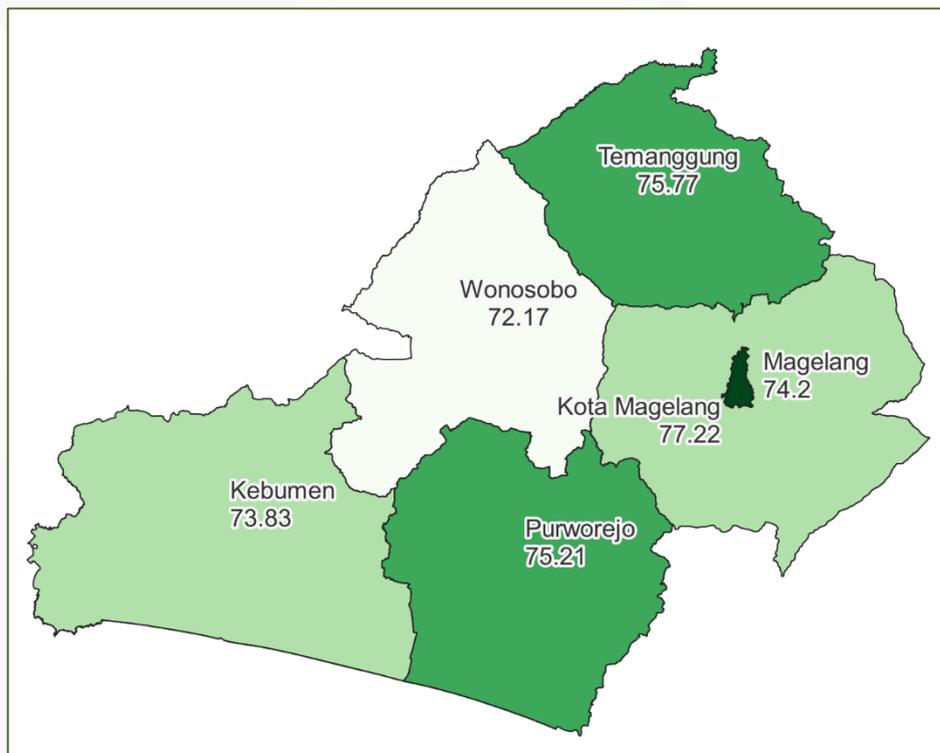
Gambar 3.6.
Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan indikator Usia Harapan Hidup, maka capaian pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke-15 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Usia Harapan Hidup Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 mencapai 75,77 tahun, lebih tinggi dibanding rata-rata Usia Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah yang baru mencapai 74,69 tahun.

Gambar 3.7.
Peta Tematik Usia Harapan Hidup (UHH)
Menurut Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu, 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Dalam regional eks-Karesidenan Kedu, Usia Harapan Hidup Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke-2 dari 6 kabupaten/kota, tepat setelah Usia Harapan Hidup Kota Magelang yang mencapai 77,22 tahun. Secara mikro, individu dengan harapan hidup yang tinggi, secara ekonomis akan memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Selain itu, keluarga dengan usia harapan hidup yang tinggi cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang

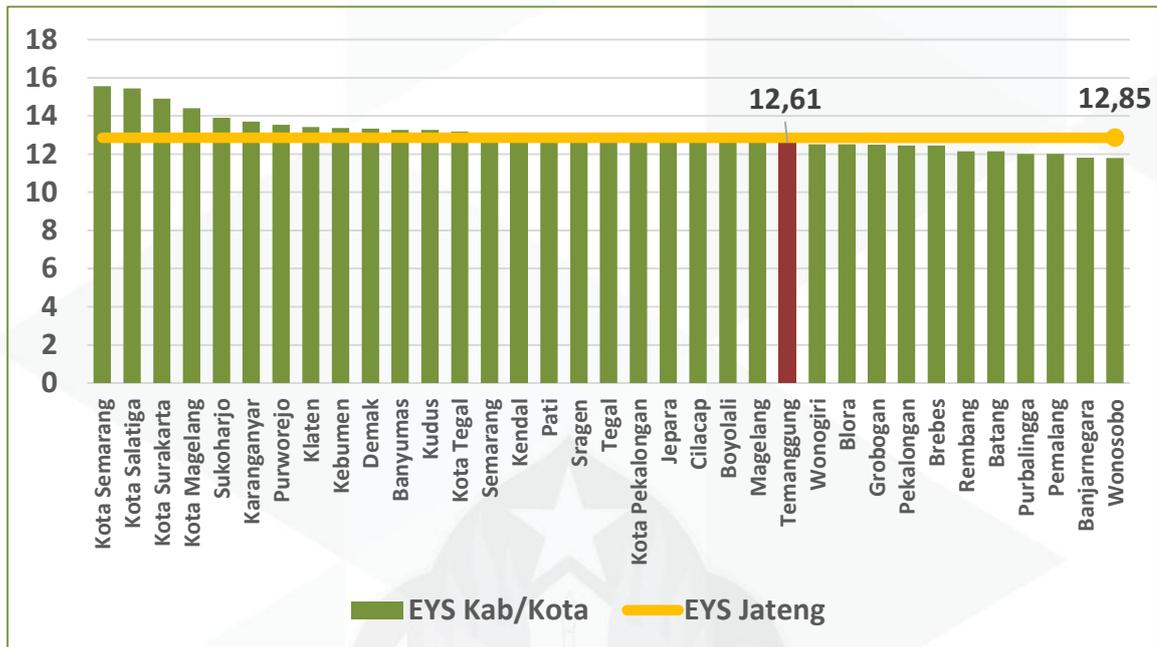
pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional akan meningkat, investasi akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan.

3.4. Harapan Lama Sekolah

Kebijakan Strategi Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2005-2025 memiliki misi membangun masyarakat berbasis pengetahuan (*Knowledge Based Society*). Pengertian "*Knowledge Based Society*" muncul karena adanya kesadaran tentang peran penting ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi. *Knowledge* yang menyatu dengan sumber daya manusia sebagai *human capital* dan teknologi menjadi pusat pembangunan ekonomi. Dalam pengertian tradisional tentang fungsi produksi maka terpusat pada buruh, modal, material dan energi. Sekarang pendekatan analisis ekonomi berkembang sehingga *knowledge* merupakan bagian langsung yang mempengaruhi faktor produksi.

Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang, digunakan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling-EYS*). Angka ini tersaji dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

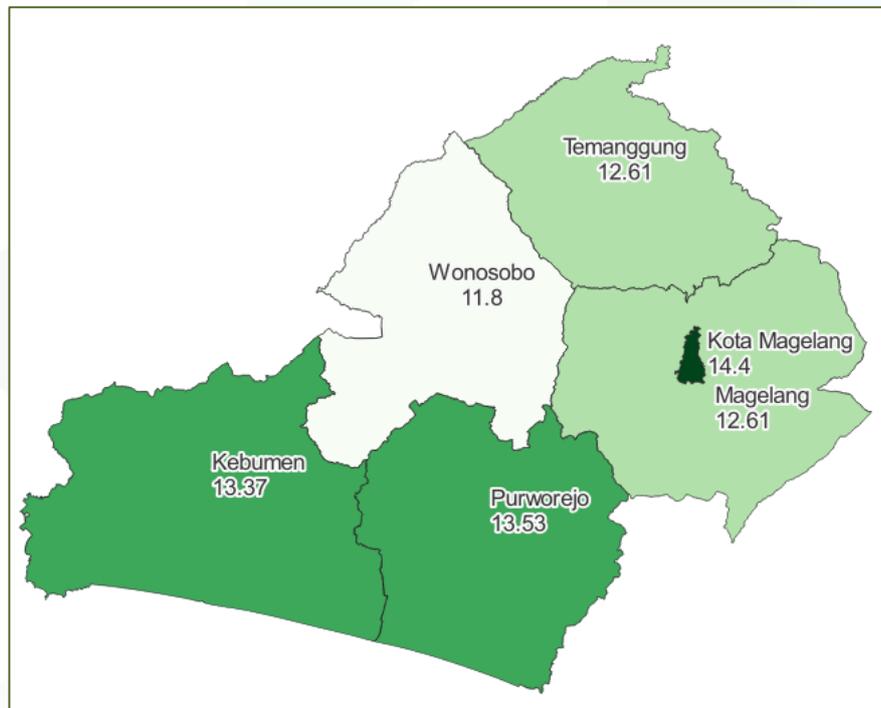
Gambar 3.8.
Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah, 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 berada pada peringkat ke-24 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 12,61 tahun dan dibawah harapan sekolah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada umumnya yang mencapai 12,85 tahun.

Gambar 3.9.
Peta Tematik Harapan Lama Sekolah (HLS)
Menurut Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu, 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

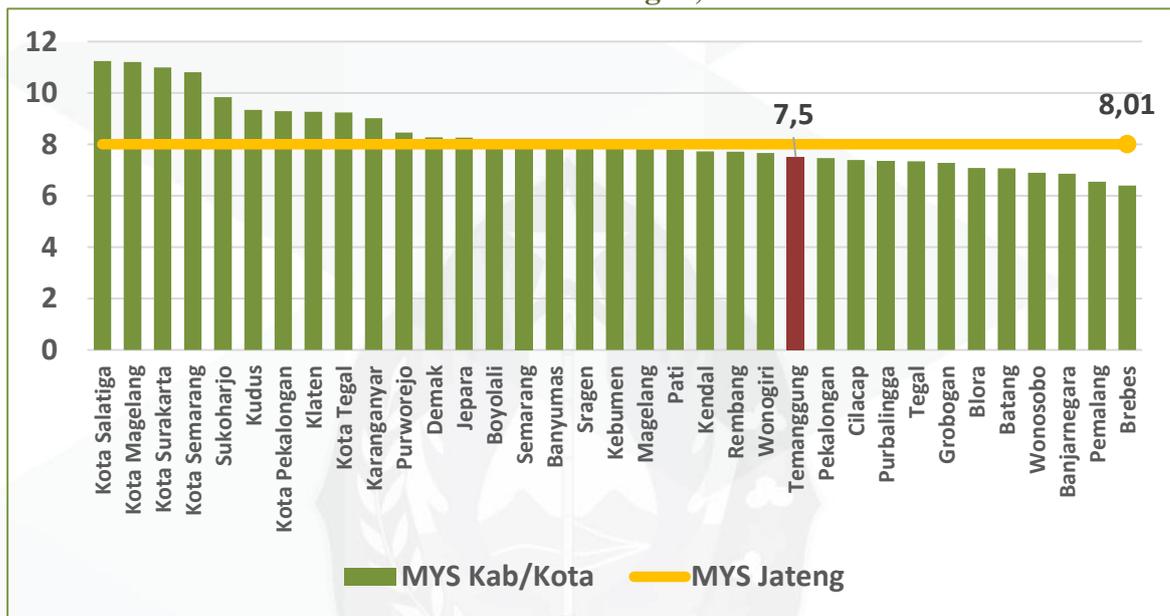
Dalam regional eks Karesidenan Kedu, status pendidikan Kabupaten Temanggung berdasarkan indikator Harapan Lama Sekolah masih tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lain. Harapan lama sekolah Kabupaten Temanggung menempati peringkat ke-5, lebih tinggi dibanding Kabupaten Wonosobo.

3.5. Rata – Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator tingkat pendidikan di suatu daerah. Peningkatan pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia yang seharusnya bisa meningkatkan produktivitas dan kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Secara pribadi, pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan seseorang memperoleh akses ke pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Todaro (2000) mengatakan bahwa tingkat penghasilan sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan.

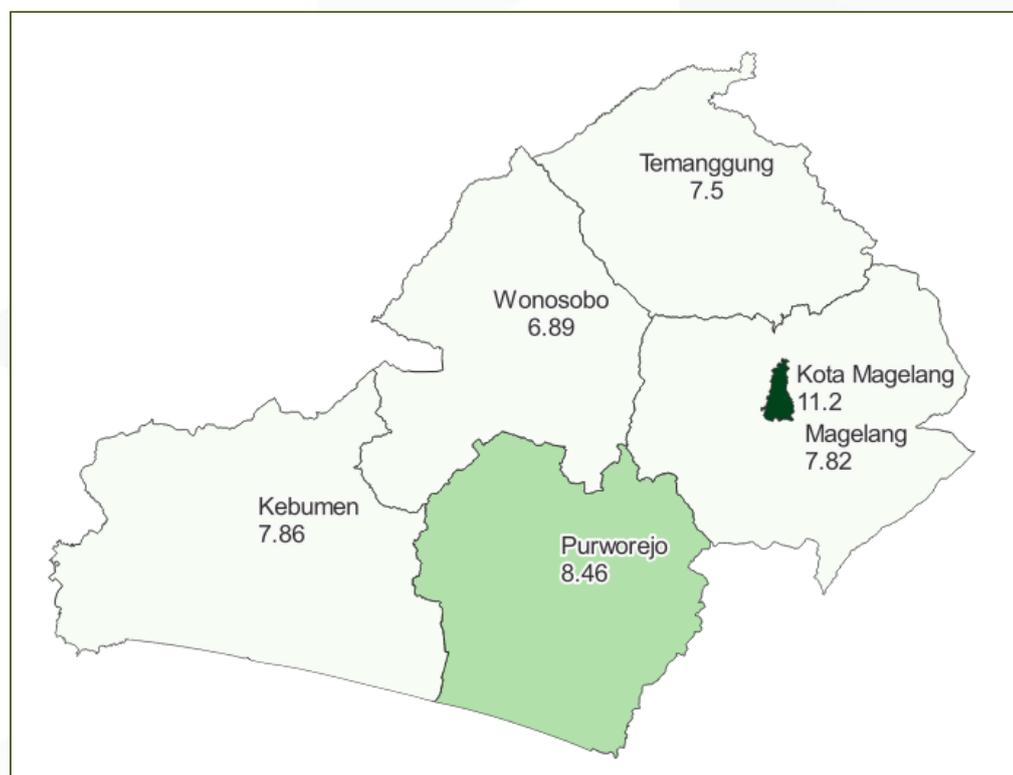
Gambar 3.10.
Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 baru mencapai 7,5 tahun, lebih rendah dibandingkan rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada umumnya yang mencapai 8,01 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung masih memprihatinkan jika dibandingkan dengan target nasional yang mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun. Rata-rata penduduk Kabupaten Temanggung bersekolah hingga kelas 6 SD atau kelas 1 SLTP. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke-24 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 3.11.
Peta tematik Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu, 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

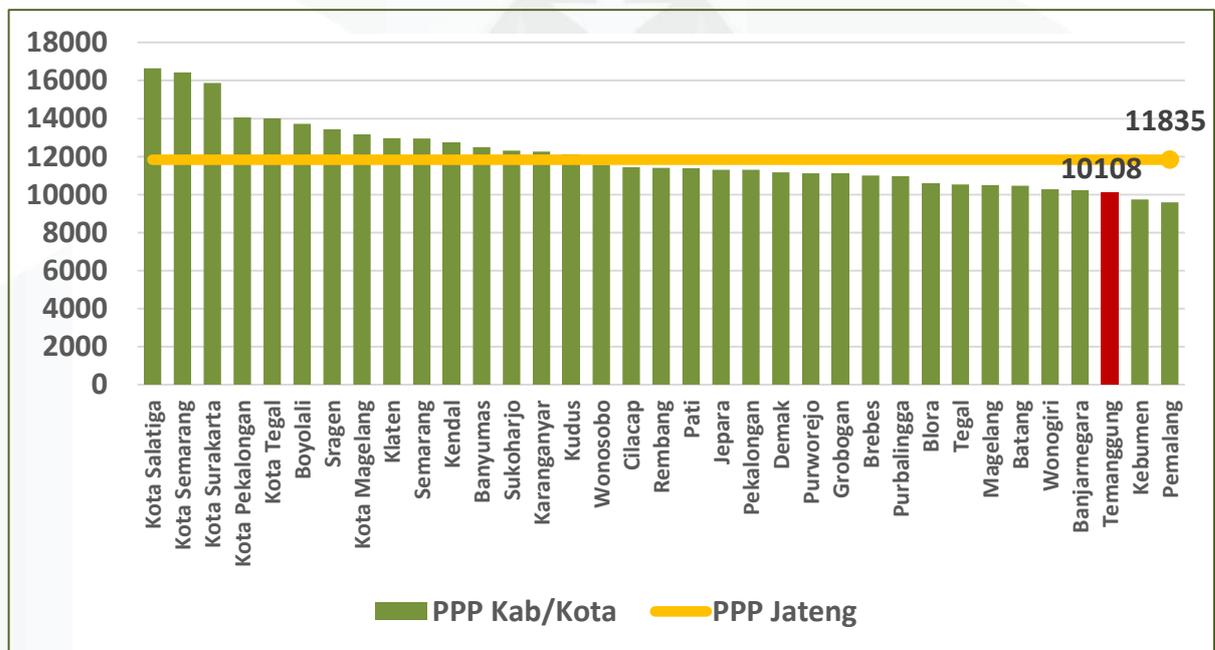
Dengan menggunakan indikator ini, capaian pembangunan pendidikan di Kabupaten Temanggung masih tertinggal dibanding kabupaten/kota lain di wilayah eks Karesidenan Kedu. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung menduduki peringkat ke-5, sedikit di atas Kabupaten Wonosobo. Sedangkan dibandingkan dengan Kota Magelang, jika penduduk Kabupaten Temanggung baru mencapai kelas 1 SLTP, rata-rata penduduk Kota Magelang sudah mencapai pendidikan hingga kelas 2 SLTA.

3.6. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil per kapita yang disesuaikan untuk keperluan perbandingan antar negara.

Sebagai catatan, setidaknya terdapat dua kelemahan penggunaan PDB riil perkapita sebagai ukuran standar hidup, yaitu bahwa PDB hanya merupakan nilai pasar atas barang dan jasa yang diproduksi, bukan ukuran kesejahteraan dan PDB per kapita menyamakan antara yang bekerja dan tidak bekerja serta distribusi pendapatan yang tidak merata. Untuk Indonesia, karena data PDB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka digunakan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan menggunakan data SUSENAS sebagai proksi pendapatan.

Gambar 3.12.
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2023 (000)

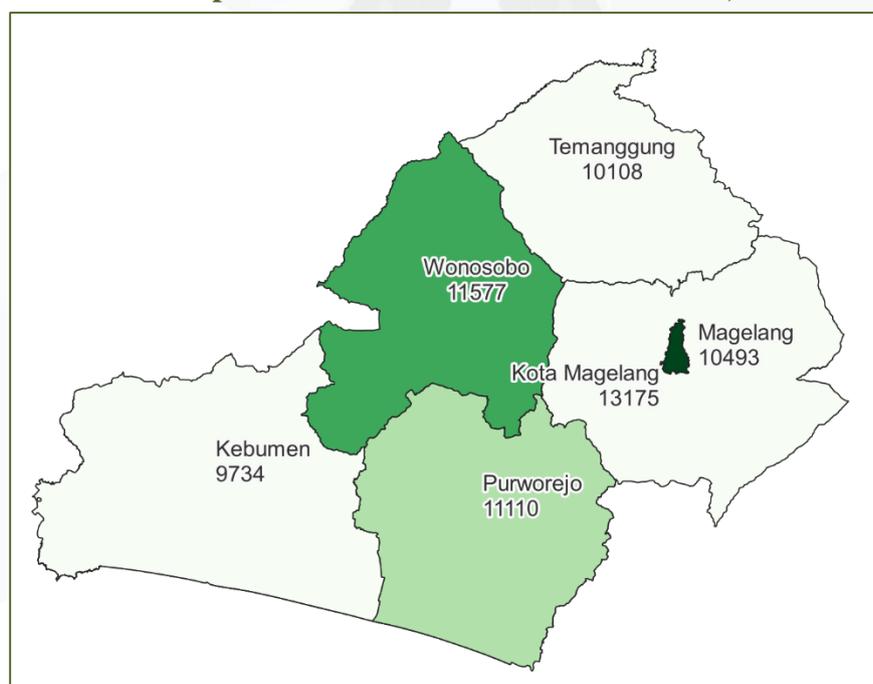


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung hanya berada pada posisi ke 33 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, bahkan secara rata-rata cukup jauh dibanding kemampuan daya beli masyarakat Jawa Tengah pada umumnya.

Pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 10.108.000,00 sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp 11.835.000,00. Dimensi ekonomi pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya selama tahun 2013-2022. Artinya perekonomian penduduk Kabupaten Temanggung sudah mulai pulih setelah mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid 19.

Gambar 3.13.
Peta Tematik Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu, 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

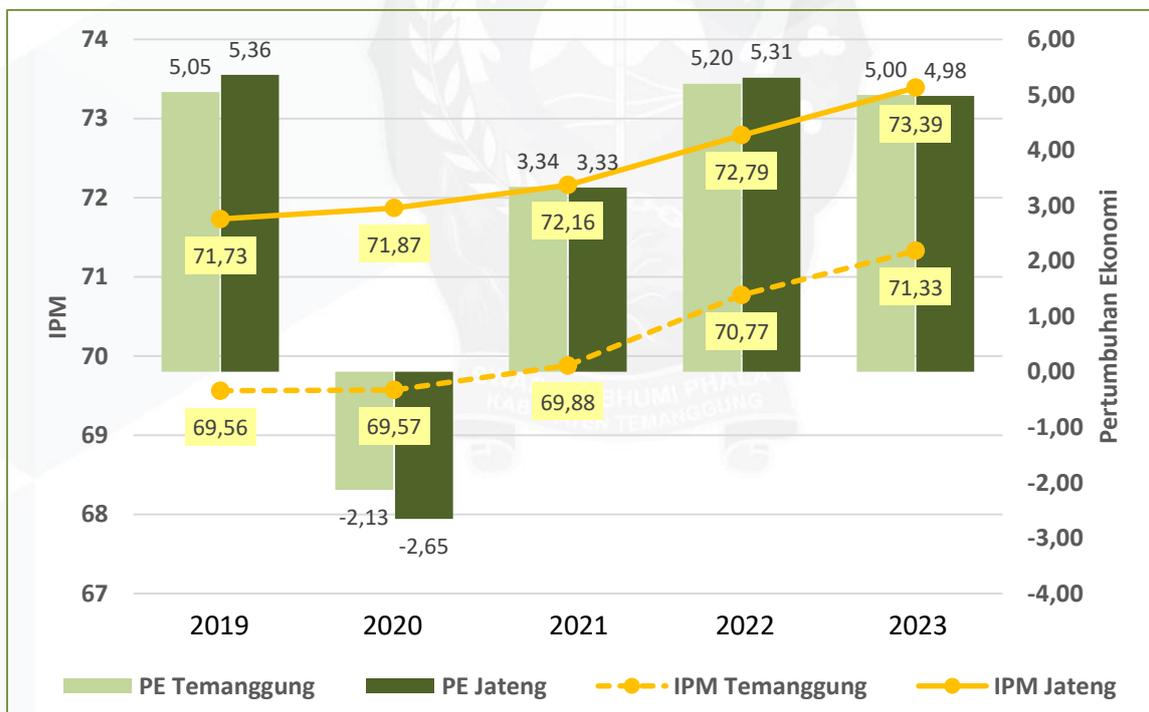
3.7. Tipologi Daerah Menurut IPM dan Pertumbuhan Ekonomi

UNDP mengungkapkan bahwa pembangunan dapat berkesinambungan apabila didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Walaupun keduanya tidak memiliki hubungan yang otomatis, namun apabila keduanya disatukan dalam kebijakan yang

searah, akan tercipta kekuatan yang saling mendukung sehingga pertumbuhan ekonomi akan sangat efektif untuk memperbaiki pembangunan manusia.

Paradigma pembangunan konvensional menekankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai capaian dari pembangunan. Memang pertumbuhan ekonomi penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat. Namun pertumbuhan ekonomi bukan merupakan akhir pembangunan manusia. Yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya dan pada gilirannya rakyat menggunakan kapabilitasnya (Kuncoro, 2013). Sebaliknya, paradigma pembangunan saat ini meletakkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan.

Gambar 3.14.
Perkembangan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi (Tahun Dasar 2010)
Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah 2019 – 2023

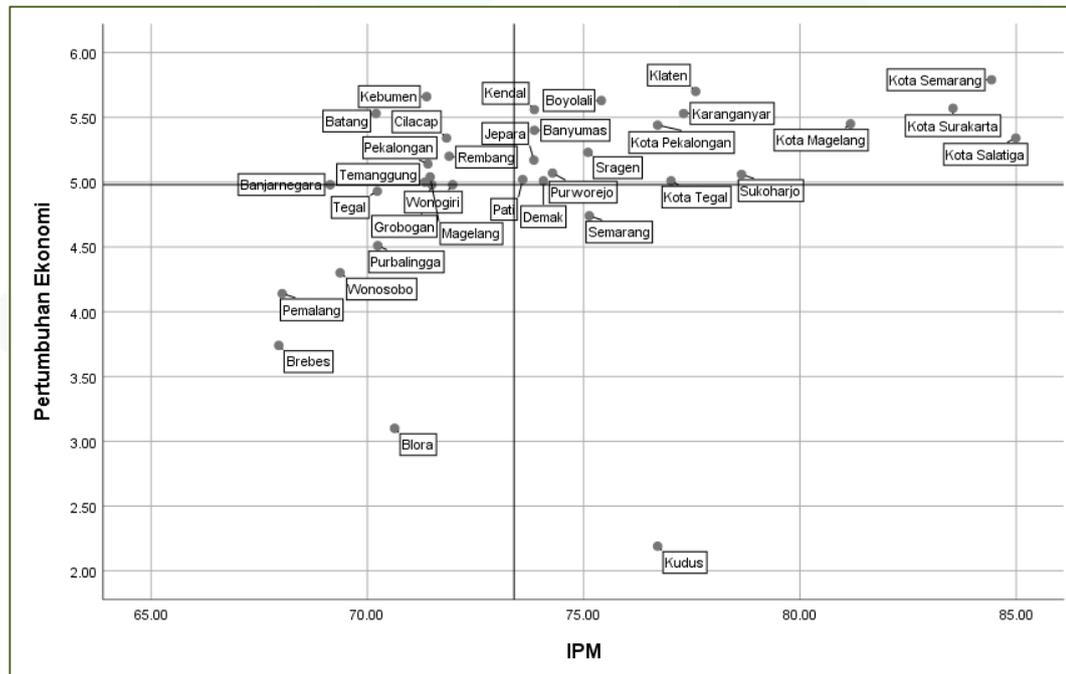


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia selama periode 2019 - 2023 cenderung mengalami peningkatan, sementara pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi yang tajam. Sepanjang 2013 - 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung konsisten tumbuh diatas 5 persen dengan pertumbuhan yang semakin cepat. Sedangkan tahun 2020 dampak dari pandemi Covid 19 terhadap perekonomian ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang minus, yaitu sebesar - 2,13 persen, namun masih sedikit lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya, Untuk melihat karakteristik IPM Kabupaten Temanggung khususnya, dan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya, maka diperlukan analisis tipologi dengan mengadopsi klasifikasi *Klassen*, yaitu menggunakan indikator IPM dan pertumbuhan ekonomi. Melalui analisis ini karakteristik IPM kabupaten/kota dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Tengah, sementara pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Disebut tinggi apabila indikator kabupaten/kota lebih tinggi dibanding indikator yang sama di Provinsi Jawa Tengah dan digolongkan rendah apabila lebih rendah dibanding indikator yang sama di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 3.15.
Tipologi Daerah Menurut IPM dan Pertumbuhan Ekonomi
(ADHK 2010) di Provinsi Jawa Tengah, 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan kuadran diatas, terlihat bahwa tipologi daerah menurut pertumbuhan ekonomi dan IPM adalah sebagai berikut :

- Daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan IPM tinggi ada 17 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Jepara, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kota Pekalongan, Kabupaten Klaten, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, dan Kota Salatiga.
- Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan IPM rendah ada 7 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kebumen, Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang.

- Daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan IPM tinggi ada 2 kabupaten/kota yaitu Kota Semarang dan Kabupaten Kudus.
- Daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan IPM rendah ada 6 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Pemalang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Blora dan Kabupaten Purbalingga.
- Terdapat 3 daerah yaitu Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Banjarnegara yang memiliki IPM rendah namun pertumbuhan ekonominya setara dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Kabupaten Temanggung sendiri berada dalam kuadran dimana pertumbuhan ekonomi tinggi dan IPM rendah dibandingkan dengan Jawa Tengah. Kondisi tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi dan IPM lebih rendah dari Jawa Tengah.

Selanjutnya untuk mengetahui pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM dapat dilakukan dengan korelasi *rank spearman*. Formula korelasi *rank spearman* adalah sebagai berikut:

$$r_s = 1 - \left(\frac{6 \sum_1^n D^2}{n(n^2 - 1)} \right)$$

Dimana :

r_s = koefisien korelasi *rank spearman*

D = perbedaan antara pasangan jenjang

N = jumlah sampel

Bila koefisien korelasi r_s bernilai nol, maka tidak ada korelasi dan bila r_s bernilai positif satu atau negatif satu, maka terdapat korelasi sempurna.

Tabel 3.1.
Korelasi Rank Spearman IPM dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2023
Correlations

			IPM	Pertumbuhan Ekonomi
Spearman's rho	IPM	Correlation Coefficient	1.000	.547**
		Sig. (2-tailed)	.	.001
		N	35	35
	Pertumbuhan Ekonomi	Correlation Coefficient	.547**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.001	.
		N	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa nilai korelasi *rank spearman* antara IPM dan pertumbuhan ekonomi bernilai positif sebesar 0.547 dengan tingkat signifikansi cukup tinggi. Secara statistik dapat dikatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM searah dan cukup erat.

Secara teori, tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dalam peningkatan produktivitas dan kreativitas penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber daya alam (Brata, 2004). Sedangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia adalah melalui mutu modal manusia terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan mempengaruhi kualitas modal manusia baik secara mikro maupun makro. Pada level mikro, peningkatan pendidikan seseorang selalu dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah. Jika upah mencerminkan produktivitas, maka semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi produktivitasnya dan hasil akhirnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi.

3.8. Tipologi Daerah Menurut IPM dan Kemiskinan

Bergesernya paradigma pembangunan dari yang hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pertumbuhan melalui pemerataan merupakan langkah bijak yang memihak kepada kepentingan masyarakat miskin dan lemah agar masyarakat miskin tersebut memiliki peluang untuk berusaha secara produktif dan pada gilirannya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Mubyarto, 2000).

Rumah tangga memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, dimana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia seperti pengeluaran untuk makanan, pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran rumah tangga itu sendiri ditentukan oleh pendapatan rumah tangga. Bagi penduduk miskin, sebagian besar bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makan sehingga penduduk miskin tidak atau hanya sedikit memiliki kesempatan mendapat pendidikan dan kesehatan yang memadai. Hasil-hasil pembangunan seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat baik masyarakat kaya, menengah maupun miskin. Oleh karenanya, keberhasilan pembangunan selain diindikasikan dengan peningkatan IPM, juga diindikasikan dengan menurunnya tingkat kemiskinan.

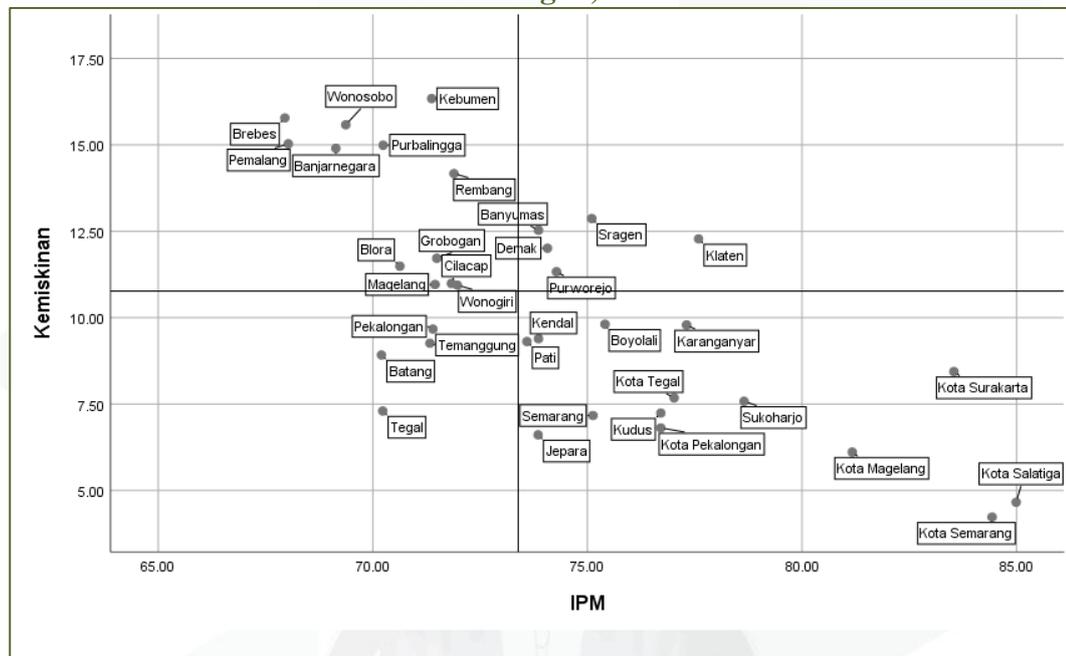
Gambar 3.16.
Perkembangan IPM dan Kemiskinan Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah, 2019 – 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Dari gambar di atas, kemajuan pembangunan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari meningkatnya IPM yang diiringi dengan menurunnya kemiskinan pada tahun 2023. Jika IPM Kabupaten Temanggung masih jauh dibawah IPM Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin di Kabupaten Temanggung justru jauh lebih rendah dibandingkan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

Gambar 3.17.
Tipologi Daerah Menurut IPM dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah, 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Meskipun tren pembangunan manusia selalu meningkat dan persentase penduduk miskin memiliki tren menurun, namun masih terdapat kesenjangan pembangunan manusia dan kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Jika dilakukan analisis tipologi dengan mengadopsi tipologi *Klassen*, maka dapat terlihat bagaimana pola kemiskinan dan IPM antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengambil nilai IPM dan kemiskinan Jawa Tengah sebagai nilai standar, maka dapat diklasifikasikan tinggi rendahnya pembangunan untuk masing-masing kabupaten/kota.

Terdapat 5 kabupaten yang memiliki IPM tinggi namun kemiskinan juga tinggi, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Demak, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten. Kabupaten/kota ini berhasil mencapai pembangunan manusia yang cukup baik namun pembangunan tersebut belum berhasil menurunkan kemiskinan di daerahnya. Salah satunya disebabkan karena

kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sebaliknya terdapat 14 kabupaten/kota yang berhasil mencapai pembangunan manusia tinggi sekaligus mampu mengurangi kemiskinan yaitu Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Boyolali, Kota Tegal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Karanganyar, Kota Pekalongan, Kabupaten Sukoharjo, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Semarang. Sementara itu, Kabupaten Temanggung termasuk dalam kuadran yang mencakup kabupaten dengan kemiskinan yang sudah rendah namun pembangunan manusia juga masih rendah, sama seperti Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Tegal. Tersisa 12 kabupaten lain yang masuk dalam kategori kemiskinan tinggi dan pembangunan manusia juga masih tertinggal.

Pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi merupakan satu paket prioritas pembangunan yang diharapkan akan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Kebijakan pengentasan kemiskinan tentu akan meningkatkan kualitas manusia melalui peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan derajat pendidikan maupun peningkatan akses ke pelayanan kesehatan dasar. Secara kuantitatif, erat tidaknya hubungan antara kemiskinan dengan IPM dapat diuji dengan statistik korelasi *rank spearman*.

Tabel 3.2.
Korelasi Rank Spearman IPM dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2023

Correlations

		IPM	Kemiskinan
Spearman's rho	IPM	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.
		N	35
	Kemiskinan	Correlation Coefficient	-.615**
		Sig. (2-tailed)	.000
		N	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa nilai korelasi *rank spearman* antara IPM dan kemiskinan adalah sebesar -0.615 dengan tingkat signifikansi cukup tinggi. Secara statistik, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan beda arah yang cukup erat antara tingkat kemiskinan dan IPM. Oleh karenanya, kebijakan pembangunan yang paling efektif adalah kebijakan pembangunan manusia yang terintegrasi dengan pengurangan kemiskinan.

BAB IV GENDER DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TEMANGGUNG

Kesetaraan gender merupakan kondisi perempuan dan laki-laki untuk menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Dapat diartikan bahwa pembangunan semestinya menempatkan laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Namun demikian upaya integrasi perspektif gender dalam segala aspek pembangunan tidaklah mudah. Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.

Berakhirnya pelaksanaan MDGs pada tahun 2015 merupakan awal dibentuknya sebuah program yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan pembangunan ini dilaksanakan selama 15 tahun dari 2015 hingga 2030. Berbeda halnya dengan MDGs, SDGs menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan. SDGs memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Salah satu topik yang diangkat dalam SDGs adalah tentang gender. Topik mengenai gender tercantum dalam tujuan ke-5 yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”.

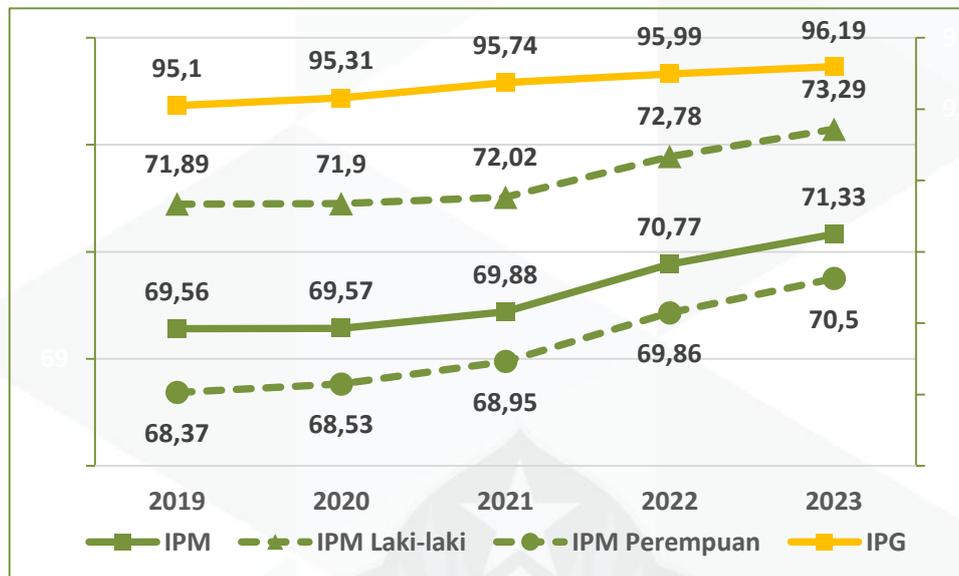
Isu gender kini menjadi salah satu prioritas pembangunan di Indonesia. Sejarah pengukuran perkembangan pembangunan gender di Indonesia dimulai

sejak UNDP mengeluarkan laporan berkala yaitu *Human Development Report* (HDR) di tahun 1990 yang mencantumkan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kemajuan suatu negara. Lima tahun kemudian, UNDP menambah konsep HDI dengan kesetaraan gender (*Gender Equality*). Sejak UNDP memasukkan kesetaraan gender dalam HDI, maka faktor kesetaraan gender harus selalu diikutsertakan dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan nasional.

Kesetaraan gender di Indonesia dapat diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), yaitu suatu indikator yang menggambarkan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam tiga aspek dasar kehidupan, yaitu usia panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dalam mewujudkan kesetaraan gender, peran aktif perempuan dalam berbagai bidang juga perlu ditingkatkan, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, pengambilan keputusan dan politik. Dalam buku ini hanya akan dibahas IPG, namun tidak IDG disebabkan karena keterbatasan.

Untuk mengetahui ketimpangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, dapat dilihat dari besaran selisih nilai IPM dan nilai IPG. Semakin kecil selisih antara IPM dan IPG menunjukkan semakin kecil perbedaan capaian pembangunan perempuan dan laki-laki. Sebaliknya, semakin besar selisih nilai IPM dan IPG menunjukkan semakin besar jarak (*gap*) antara capaian pembangunan perempuan dan laki-laki. Indikator ini dapat menunjukkan seberapa jauh kesetaraan gender di suatu wilayah.

Gambar 4.1.
Perkembangan IPM Laki-Laki, IPM Perempuan, IPM dan IPG
Kabupaten Temanggung, 2019 – 2023



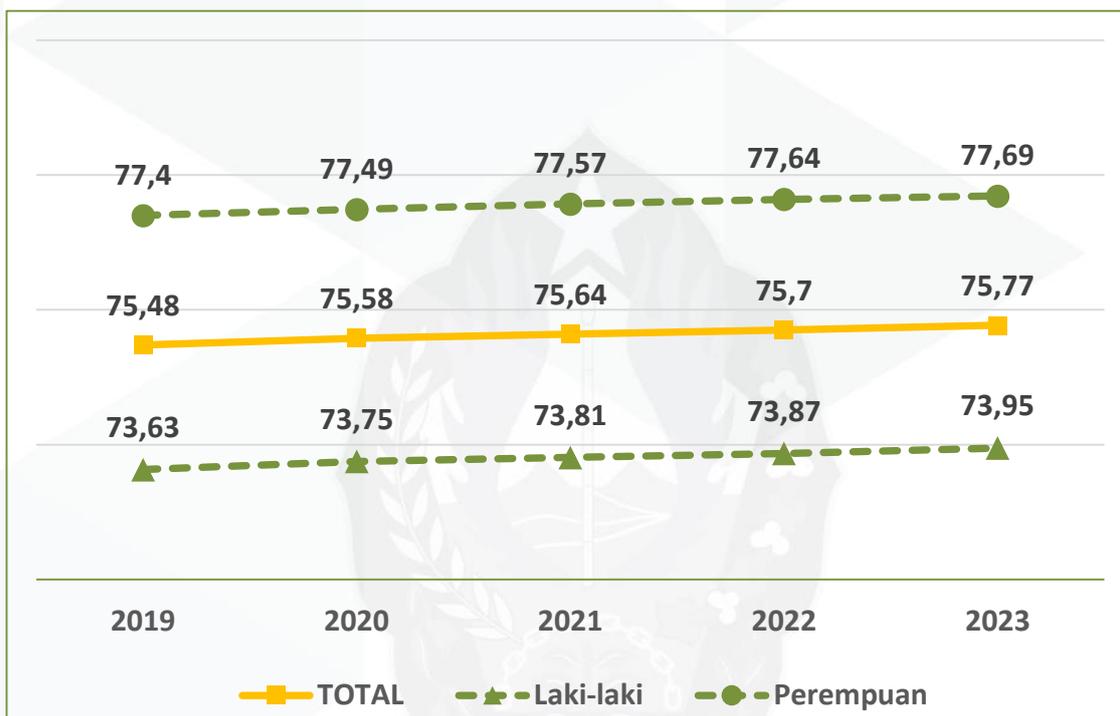
Gambar di atas menunjukkan capaian pembangunan manusia Kabupaten Temanggung dipilah menurut jenis kelamin serta nilai IPG. Dapat dilihat bahwa hingga tahun 2023, capaian pembangunan manusia perempuan konsisten berada di bawah capaian pembangunan manusia laki-laki, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai IPG 96,19. Kendati demikian, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai IPG tahun 2023 mengalami kenaikan, yang mana bisa diartikan bahwa kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan finansial telah berkurang.

4.1. Umur Perempuan Lebih Panjang Dibanding Laki-Laki

Secara genetik, perempuan memiliki derajat kesehatan yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini dikenal dengan *female advantages* (FA). Keberadaan *female advantages* ini terkait dengan hormon perempuan serta kebiasaan-kebiasaan hidup perempuan yang secara umum dianggap “lebih sehat” dibanding laki-laki. Implikasi dari hal ini adalah harapan hidup perempuan khususnya di Indonesia yang

selalu bernilai lebih tinggi dibanding laki-laki. Meskipun berbeda kecenderungan UHH yang makin tinggi tiap tahunnya menjadi peringatan bagi semua kalangan untuk mempersiapkan sarana untuk kaum lansia yang jumlahnya diprediksikan meningkat dalam kurun waktu dekat.

Gambar 4.2.
Perkembangan Usia Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung, 2019 – 2023



Selama periode tahun 2019 - 2023, usia harapan hidup penduduk Kabupaten Temanggung baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan peningkatan. Gambar diatas menunjukkan tren UHH perempuan di Kabupaten Temanggung selalu di atas UHH laki-laki. Pada tahun 2023 UHH perempuan sebesar 77,69 tahun, hampir 4 tahun lebih lama dibanding UHH laki-laki yang berada di tingkat 73,95 tahun. Capaian ini menjadi salah satu hal yang berkontribusi positif terhadap IPG tahun 2023.

Hal ini dapat berkaitan dengan perbedaan kepedulian terhadap kesehatan antara perempuan dan laki-laki. Hasil penelitian Stefan Ek (2015) mengungkap

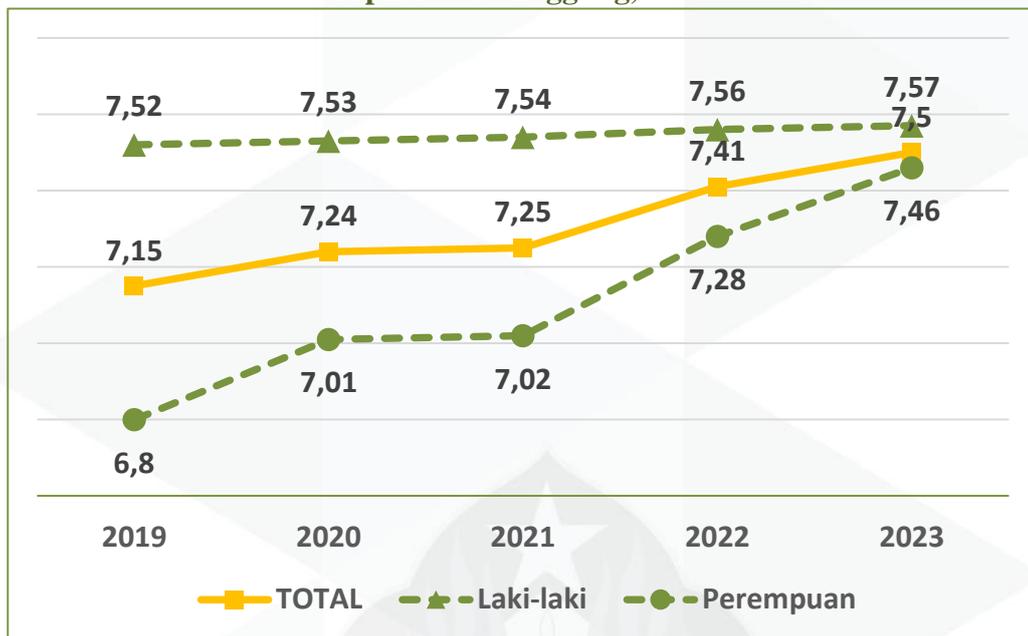
bahwa perempuan menaruh perhatian dan rasa keingintahuan yang lebih besar dibanding laki-laki mengenai kesehatan serta lebih memperhatikan barang-barang yang mereka beli yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kesehatan.

4.2. Capaian Pendidikan Antargender Sudah cukup Baik

Pendidikan merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Pencapaian mengenai pendidikan ini tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, semakin tinggi pula kualitas pembangunan yang dicapai.

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan capaian dalam hal pendidikan penduduk dengan umur 25 tahun ke atas yang diasumsikan telah menyelesaikan fase bersekolah. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Temanggung baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2023, terjadi perbedaan capaian indikator antargender yang terlihat kurang signifikan. Secara rata-rata laki-laki sudah mampu mengenyam pendidikan selama 7,57 tahun sedangkan perempuan berada di bawahnya yaitu sebesar 7,46 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang telah ditempuh laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Gambar 4.3.
Perkembangan Rata-Rata Lama sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung, 2019– 2023

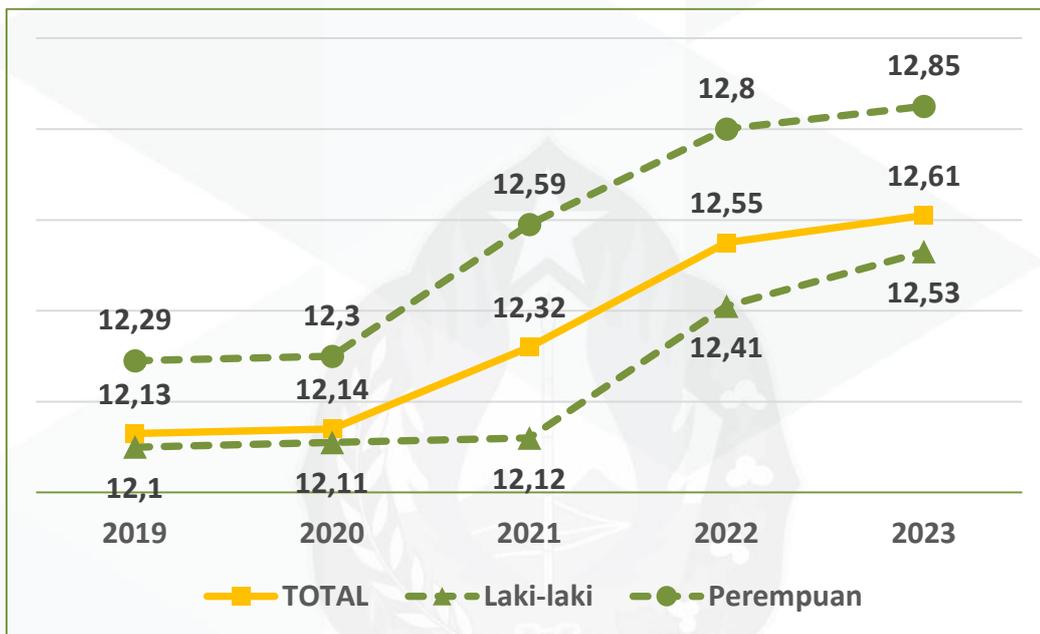


Dalam periode tahun 2019 – 2023, tren menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan selalu berada di bawah capaian laki-laki. Jika dilihat dari grafik pertumbuhannya, dapat dilihat bahwa RLS perempuan tumbuh lebih cepat dibanding laki-laki. Hal ini yang menyebabkan kesenjangan RLS antargender menurun dari waktu ke waktu sehingga memberikan dukungan positif terhadap nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Kemajuan pendidikan bagi kaum perempuan juga terlihat dari indikator harapan lama sekolah (HLS). Harapan lama sekolah mengukur peluang lamanya seseorang untuk menempuh pendidikan. Indikator ini dihitung dari penduduk umur 7 tahun ke atas. Berdasarkan indikator ini dapat dilihat bahwa pembangunan pendidikan bagi kaum perempuan sudah cukup setara dengan kaum laki-laki. Secara umum, angka harapan lama sekolah perempuan di Temanggung justru sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki. Pada tahun 2023, angka harapan lama sekolah perempuan mencapai 12,85 tahun sedangkan laki laki mencapai 12,53

tahun. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang, baik laki-laki maupun perempuan adalah selama 12 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan minimal sampai dengan lulus SLTA.

Gambar 4.4.
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Temanggung, 2019 – 2023

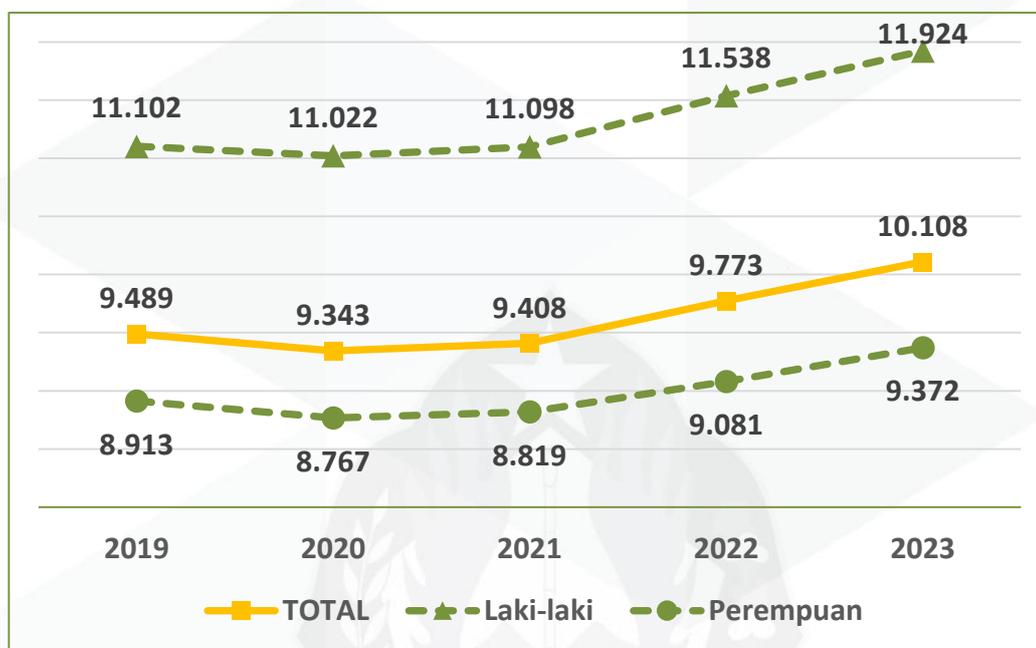


4.3. Kesetaraan Ekonomi Antar Gender

Salah satu hal yang berpengaruh signifikan dalam pembangunan adalah faktor ekonomi. Seringkali keberhasilan pembangunan dilihat dari sisi kemampuan perekonomian, tak terkecuali dalam hal pembangunan manusia dan pembangunan gender. Selain tercantum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin kelima tentang kesetaraan gender, isu ekonomi juga menjadi fokus pada tujuan kesepuluh yakni “mengurangi kesenjangan”, termasuk di dalamnya kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Dalam mengukur capaian pembangunan manusia dari sisi ekonomi, UNDP menggunakan indikator Pendapatan Nasional

Bruto (PNB) perkapita, namun karena PNB tidak tersedia pada tingkat kabupaten, maka PNB diproksi menggunakan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP).

Gambar 4.5.
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung, 2019 – 2023



Gambar di atas menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan pengeluaran perkapita yang cukup lebar antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2023, secara rata-rata pengeluaran perkapita perempuan sebesar Rp. 9,372 juta per tahun. Angka ini jauh di bawah pengeluaran perkapita laki-laki yang mencapai Rp. 11,924 juta per tahun. Perbedaan yang cukup tinggi pada pengeluaran perkapita antara laki-laki dan perempuan selama ini tentunya berkaitan langsung dengan perbedaan pendapatan yang diterima.

Perbedaan seperti tingkat pendidikan perempuan menyebabkan perempuan lebih banyak terserap di sektor informal sehingga mereka masuk ke dalam pasar tenaga kerja dengan kurangnya keterjaminan pekerjaan, upah yang rendah, serta keterbatasan terhadap pelatihan profesional dan promosi karier yang terdapat pada sektor formal (Kementrian PPA, 2023), Oleh karenanya diperlukan usaha serta

kebijakan di berbagai aspek baik ekonomi maupun non-ekonomi seperti peningkatan kualitas SDM perempuan dari sisi pendidikan dan keterampilan untuk perlahan mengurangi masalah disparitas ekonomi yang terjadi.

Menilik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meraih nilai IPG tertinggi se-Indonesia pada tahun 2021, Pemerintah Daerah Yogyakarta telah menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah daerah Yogyakarta yang sudah responsif gender antara lain bidang kesehatan terdapat jaminan persalinan (jampersal), sosialisasi reproduksi yang sarasannya adalah perempuan serta posyandu lansia. Selain itu, di bidang ekonomi, pemerintah provinsi Yogyakarta telah melaksanakan perencanaan pembangunan responsif gender sehingga mendukung penganggaran yang responsif gender sejak tahun 2008. Selain itu, di bidang pendidikan, pemerintah provinsi Yogyakarta telah melaksanakan sosialisasi yang masif terhadap orang tua yang memiliki anak usia sekolah terkait manfaat dan pentingnya pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan baik pada perempuan maupun laki-laki (Kementerian PPPA, 2023).

BAB V KESIMPULAN

Dari hasil analisis pada bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu :

1. IPM merupakan indikator untuk mengukur pelaksanaan pembangunan secara multidimensi. Karena IPM disusun berdasarkan konsep UN, maka IPM dapat diperbandingkan baik antar daerah maupun antar waktu. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Temanggung mencapai 71,33, meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 70,77 dan tetap pada peringkat ke 27 diantara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. IPM Kabupaten Temanggung didukung kuat oleh pembangunan dalam dimensi kesehatan di Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2023, Usia Harapan Hidup di Kabupaten Temanggung sudah cukup tinggi yaitu 75,77 tahun dan berada pada peringkat ke-15 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah atau peringkat ke 2 diantara kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu.
3. Sebaliknya pembangunan dimensi pendidikan di Kabupaten Temanggung hingga tahun 2023 masih cukup tertinggal dibanding kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Hal ini dilihat dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang masih jauh tertinggal yaitu masing masing sebesar 12,61 tahun (peringkat ke-24) dan 7,5 tahun (pada peringkat ke-24). Dapat dikatakan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Temanggung bersekolah hanya sampai kelas 1 SLTP.
4. Pembangunan dimensi ekonomi yang ditunjukkan dengan pengeluaran per kapita juga masih rendah. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita

masyarakat Kabupaten Temanggung baru mencapai Rp 10.108.000,00 per kapita per tahun dan berada dalam peringkat ke-33 dari kabupaten/kota di Jawa Tengah, jauh di bawah pengeluaran per kapita masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang mencapai Rp 11.835.000,00.

5. Angka IPG Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 baru mencapai 96,19, artinya masih ada gap yang cukup lebar antara pembangunan laki-laki dan perempuan. Pembangunan bidang kesehatan dan bidang pendidikan tidak menunjukkan bias gender namun dalam bidang ekonomi terlihat ada perbedaan yang cukup signifikan antar gender. Pengeluaran per kapita penduduk laki – laki sudah mencapai Rp 11.924.000,00 sedangkan penduduk perempuan hanya Rp 9.372.000,00. Untuk mengatasi gap tersebut, Pemerintah Kabupaten sebaiknya menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung terhadap peningkatan ketrampilan dan perluasan kesempatan kerja bagi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, Sri Moertiningsih. 2005. *Bonus Demografi. Menjelaskan Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk Dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Pidato Disampaikan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ekonomi Kependudukan pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2004. *Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tingkat II di Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.
- Hartono, Djoko.2008. *AKSES PENDIDIKAN DASAR: Kajian dari Segi Transisi SD ke SMP*. Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. III, No.2, 2008
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Kemeterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2023*. Kemeterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta.
- Mubyarto.2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta:BPFE
- Sukirno,Sadono, 2006, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta:Kencana
- Todaro dan Smith, 2000. *Pembangunan Ekonomi Jilid I* : Jakarta : Erlangga
- UNDP.1999. *Laporan Pembangunan Manusia*.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019 – 2023

Kabupaten/Kota	IPM				
	2019	2019	2020	2021	2023
Cilacap	69,98	69,95	70,42	70,99	71,83
Banyumas	71,96	71,98	72,44	73,17	73,86
Purbalingga	68,99	68,97	69,15	69,54	70,24
Banjarnegara	67,34	67,45	67,86	68,61	69,14
Kebumen	69,6	69,81	70,05	70,79	71,37
Purworejo	72,5	72,68	72,98	73,6	74,28
Wonosobo	68,27	68,22	68,43	68,89	69,37
Magelang	69,87	69,87	70,12	70,85	71,45
Boyolali	73,8	74,25	74,4	74,97	75,41
Klaten	75,29	75,56	76,12	76,95	77,59
Sukoharjo	76,84	76,98	77,13	77,94	78,65
Wonogiri	69,98	70,25	70,49	71,04	71,97
Karanganyar	75,89	75,86	75,99	76,58	77,31
Sragen	73,43	73,95	74,08	74,65	75,1
Grobogan	69,86	69,87	70,41	70,97	71,49
Blora	68,65	68,84	69,37	69,95	70,63
Rembang	70,15	70,02	70,43	71	71,89
Pati	71,35	71,77	72,28	73,14	73,59
Kudus	74,94	75	75,16	75,89	76,71
Jepara	71,88	71,99	72,36	73,15	73,85
Demak	71,87	72,22	72,57	73,36	74,07
Semarang	74,14	74,1	74,24	74,67	75,13
Temanggung	69,56	69,57	69,88	70,77	71,33
Kendal	71,97	72,29	72,5	73,19	73,86
Batang	68,42	68,65	68,92	69,45	70,2
Pekalongan	69,71	69,63	70,11	70,81	71,4
Pemalang	66,32	66,32	66,56	67,19	68,03
Tegal	68,24	68,39	68,79	69,53	70,23
Brebes	66,12	66,11	66,32	67,03	67,95
Kota Magelang	78,8	78,99	79,43	80,39	81,17
Kota Surakarta	81,86	82,21	82,62	83,08	83,54
Kota Salatiga	83,12	83,14	83,6	84,35	84,99
Kota Semarang	83,19	83,05	83,55	84,08	84,43
Kota Pekalongan	74,77	74,98	75,4	75,9	76,71
Kota Tegal	74,93	75,07	75,52	76,15	77,02
JAWA TENGAH	71,73	71,87	72,16	72,79	73,39

Lampiran 2. Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019 – 2023

Kabupaten/Kota	Harapan Hidup				
	2019	2019	2020	2021	2023
Cilacap	73,52	73,73	73,9	74,07	74,25
Banyumas	73,55	73,72	73,8	73,88	73,98
Purbalingga	73,02	73,14	73,21	73,28	73,37
Banjarnegara	74,01	74,18	74,28	74,37	74,47
Kebumen	73,22	73,4	73,55	73,7	73,83
Purworejo	74,52	74,72	74,87	75,03	75,21
Wonosobo	71,6	71,82	71,94	72,05	72,17
Magelang	73,56	73,72	73,88	74,03	74,2
Boyolali	75,83	75,95	76,03	76,12	76,23
Klaten	76,68	76,78	76,86	76,95	77,07
Sukoharjo	77,55	77,65	77,73	77,82	77,86
Wonogiri	76,07	76,16	76,28	76,41	76,56
Karanganyar	77,38	77,47	77,55	77,64	77,72
Sragen	75,62	75,71	75,79	75,87	75,97
Grobogan	74,61	74,75	74,84	74,93	75,04
Blora	74,23	74,41	74,51	74,6	74,71
Rembang	74,43	74,55	74,61	74,68	74,77
Pati	76,04	76,22	76,27	76,32	76,39
Kudus	76,5	76,6	76,68	76,76	76,86
Jepara	75,74	75,84	75,91	75,97	76,04
Demak	75,31	75,4	75,46	75,52	75,6
Semarang	75,63	75,73	75,79	75,86	75,95
Temanggung	75,48	75,58	75,64	75,7	75,77
Kendal	74,33	74,43	74,48	74,53	74,58
Batang	74,59	74,69	74,74	74,79	74,85
Pekalongan	73,57	73,69	73,74	73,8	73,87
Pemalang	73,22	73,4	73,53	73,65	73,85
Tegal	71,4	71,6	71,72	71,85	72
Brebes	69,04	69,33	69,54	69,74	69,96
Kota Magelang	76,75	76,85	76,93	77,02	77,22
Kota Surakarta	77,12	77,22	77,32	77,43	77,63
Kota Salatiga	77,22	77,4	77,55	77,72	77,93
Kota Semarang	77,25	77,34	77,51	77,69	77,9
Kota Pekalongan	74,28	74,38	74,44	74,51	74,6
Kota Tegal	74,34	74,46	74,54	74,64	74,77
JAWA TENGAH	74,23	74,37	74,47	74,57	74,69

Lampiran 3. Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019 – 2023

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah				
	2019	2019	2020	2021	2023
Cilacap	12,49	12,5	12,63	12,66	12,67
Banyumas	12,82	12,85	13,03	13,21	13,26
Purbalingga	11,98	11,99	12	12,01	12,02
Banjarnegara	11,45	11,46	11,63	11,81	11,82
Kebumen	13,04	13,34	13,35	13,36	13,37
Purworejo	13,49	13,5	13,51	13,52	13,53
Wonosobo	11,74	11,75	11,76	11,78	11,8
Magelang	12,53	12,54	12,55	12,58	12,61
Boyolali	12,43	12,56	12,57	12,62	12,66
Klaten	13,24	13,25	13,39	13,4	13,41
Sukoharjo	13,82	13,83	13,84	13,9	13,91
Wonogiri	12,48	12,49	12,5	12,51	12,52
Karanganyar	13,67	13,68	13,69	13,7	13,71
Sragen	12,69	12,83	12,84	12,91	12,92
Grobogan	12,29	12,3	12,44	12,45	12,46
Blora	12,19	12,2	12,35	12,44	12,51
Rembang	12,1	12,11	12,12	12,13	12,15
Pati	12,41	12,65	12,94	12,95	12,96
Kudus	13,22	13,23	13,24	13,25	13,26
Jepara	12,74	12,75	12,76	12,77	12,85
Demak	13,01	13,31	13,32	13,33	13,34
Semarang	12,94	12,97	12,98	13,04	13,05
Temanggung	12,13	12,14	12,32	12,55	12,61
Kendal	12,8	12,95	12,96	12,97	12,99
Batang	12	12,01	12,13	12,14	12,15
Pekalongan	12,4	12,41	12,42	12,43	12,44
Pemalang	11,94	11,95	11,96	11,98	12,01
Tegal	12,58	12,67	12,89	12,91	12,92
Brebes	12,03	12,04	12,05	12,15	12,44
Kota Magelang	13,81	14,14	14,15	14,31	14,4
Kota Surakarta	14,55	14,87	14,88	14,89	14,9
Kota Salatiga	15,34	15,41	15,42	15,43	15,44
Kota Semarang	15,51	15,52	15,53	15,54	15,55
Kota Pekalongan	12,83	12,84	12,85	12,86	12,87
Kota Tegal	13,04	13,05	13,07	13,08	13,18
JAWA TENGAH	12,68	12,7	12,77	12,81	12,85

Lampiran 4. Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019 – 2023

Kabupaten/Kota	Rata – Rata Lama Sekolah				
	2019	2019	2020	2021	2023
Cilacap	6,93	6,97	7,09	7,18	7,39
Banyumas	7,42	7,52	7,63	7,78	7,87
Purbalingga	7,14	7,24	7,25	7,33	7,34
Banjarnegara	6,5	6,74	6,75	6,84	6,86
Kebumen	7,53	7,54	7,55	7,85	7,86
Purworejo	7,91	8,12	8,21	8,32	8,46
Wonosobo	6,76	6,81	6,82	6,88	6,89
Magelang	7,77	7,78	7,79	7,81	7,82
Boyolali	7,56	7,84	7,85	8,08	8,09
Klaten	8,31	8,58	8,81	9,09	9,27
Sukoharjo	9,1	9,34	9,35	9,62	9,84
Wonogiri	7,04	7,33	7,34	7,42	7,67
Karanganyar	8,52	8,56	8,57	8,79	9,02
Sragen	7,34	7,65	7,66	7,79	7,87
Grobogan	6,86	6,91	7,11	7,26	7,28
Blora	6,58	6,83	6,99	7,01	7,08
Rembang	7,15	7,16	7,3	7,41	7,72
Pati	7,19	7,44	7,48	7,79	7,8
Kudus	8,63	8,75	8,76	9,06	9,34
Jepara	7,44	7,68	7,79	8,09	8,26
Demak	7,55	7,71	7,86	8,1	8,27
Semarang	8,01	8,02	8,03	8,05	8,07
Temanggung	7,15	7,24	7,25	7,41	7,5
Kendal	7,25	7,45	7,46	7,71	7,73
Batang	6,63	6,87	6,88	6,9	7,07
Pekalongan	6,88	6,91	7,17	7,46	7,47
Pemalang	6,41	6,42	6,45	6,5	6,55
Tegal	6,86	6,98	6,99	7,25	7,34
Brebes	6,2	6,21	6,22	6,35	6,4
Kota Magelang	10,33	10,39	10,62	10,94	11,2
Kota Surakarta	10,54	10,69	10,9	10,92	11
Kota Salatiga	10,41	10,42	10,66	10,95	11,24
Kota Semarang	10,52	10,53	10,78	10,8	10,81
Kota Pekalongan	8,71	8,96	9,18	9,2	9,29
Kota Tegal	8,31	8,51	8,73	9	9,24
JAWA TENGAH	7,53	7,69	7,75	7,93	8,01

Lampiran 5. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu upiah/orang/tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019– 2023

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan				
	2019	2019	2020	2021	2023
Cilacap	10639	10440	10534	10904	11432
Banyumas	11703	11448	11546	11905	12492
Purbalingga	10131	9914	10032	10277	10964
Banjarnegara	9547	9263	9407	9776	10226
Kebumen	9066	8901	9028	9282	9734
Purworejo	10342	10163	10275	10671	11110
Wonosobo	10871	10621	10760	11108	11577
Magelang	9387	9301	9440	10011	10493
Boyolali	13079	12910	13031	13250	13716
Klaten	12074	11921	12017	12522	12968
Sukoharjo	11557	11325	11428	11841	12319
Wonogiri	9426	9286	9429	9780	10283
Karanganyar	11569	11428	11509	11798	12260
Sragen	12720	12589	12679	13052	13439
Grobogan	10350	10221	10294	10610	11083
Blora	9795	9571	9669	10067	10541
Rembang	10551	10328	10519	10937	11399
Pati	10660	10390	10506	10948	11385
Kudus	11318	11160	11272	11609	12088
Jepara	10609	10343	10536	10913	11306
Demak	10344	10128	10248	10698	11166
Semarang	12116	11966	12070	12448	12943
Temanggung	9489	9343	9408	9773	10108
Kendal	11597	11425	11608	11999	12755
Batang	9573	9431	9524	9972	10470
Pekalongan	10508	10312	10409	10707	11297
Pemalang	8546	8461	8573	8994	9587
Tegal	9798	9612	9700	10020	10537
Brebes	10238	10058	10152	10514	10993
Kota Magelang	12514	12210	12349	12816	13175
Kota Surakarta	15049	14761	14911	15463	15870
Kota Salatiga	15944	15699	15843	16351	16650
Kota Semarang	15550	15243	15425	16047	16420
Kota Pekalongan	12680	12467	12598	13158	14056
Kota Tegal	13250	12999	13143	13455	14013
JAWA TENGAH	11102	10930	11034	11377	11835